

## ABSTRAK

Tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika sangat membahayakan bangsa dan negara, oleh karenanya harus diperangi melalui proses penegakan hukum yang benar dan adil, sehingga dapat menanggulangi tindak pidana narkotika dengan cara menghukum setiap orang yang bersalah. Sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, maka kepolisian memiliki kedudukan penting dalam mengungkap kasus yang terjadi dalam masyarakat, termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis mengenai pelaksanaan, hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori negara hukum, teori penegakan hukum, dan teori kewenangan.

Hasil penelitian ini adalah : (1) pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dilakukan dengan upaya : (a) pencegahan : (i) pembinaan dan penyuluhan, (ii) memberdayakan masyarakat sebagai sumber informasi, (iii) rehabilitasi bagi pemakai; (b) pemberantasan : (i) melakukan penangkapan, penggeledahan, penyidikan dan penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum; (ii) memberantas jaringan narkotika; (iii) kerjasama internasional (iv) eredikasi; (v) interdiksi; (vi) kerjasama dengan bank guna merampas asset hasil peredaran narkotika; (2) hambatan dalam penegakan hukum dalam memberantas terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari segi : (a) substansi hukum yang terkait dengan aturan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena para bandar narkoba bisa berlindung di balik status pengguna yang pada akhirnya dilakukan rehabilitasi; (b) struktur hukum terkait dengan kemampuan sumber daya manusianya belum maksimal; serta (c) budaya hukum karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi; serta (3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah : (a) meningkatkan sumber daya manusia dengan pelatihan dan penataan serta sekolah kejuruan reserse narkotika; giat melakukan bimbingan dan penyuluhan, (b) bekerjasama dengan instansi terkait, baik intern maupun eksternal dengan melakukan cek *urine* secara periodik dan memberikan informasi; (c) membentuk jaringan informasi dan sumber informasi di masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, dan Narkotika

## ABSTRACT

The criminal act of narcotics abuse and traffic is very dangerous to the nation and state, therefore it must be fought through a process of law enforcement that is true and fair, so as to overcome the criminal narcotics by punishing every person who is guilty. As the front guard in law enforcement, the police have an important position in disclosing cases that occur in the community, including the criminal act of narcotics abuse and traffic.

The purpose of this study is to describe, examine and analyze the implementation, obstacles and law enforcement efforts against the crime of narcotics abuse in the Directorate of Drugs Detective Police Region of Central Java.

This research uses sociological juridical approach, with analytical descriptive research specification. The data used in this study are primary and secondary data, obtained through interviews and literature study, which then analyzed qualitatively using state law theory, law enforcement theory, and authority theory.

The results of this study are : (1) the implementation of law enforcement against narcotic abuse crime in the Directorate of Drugs Detention of Central Java Regional Police is done by: (a) prevention : (i) coaching and counseling, (ii) empowering the community as a source of information, (iii) rehabilitation for users; (b) the eradication : (i) the arrest, search, investigation and submission of the case files to the public prosecutor; (ii) eradication of the narcotics network; (iii) international cooperation (iv) eradication; (v) interdiction; (vi) cooperation with banks to seize assets resulting from narcotics; (2) obstacles in law enforcement in combating criminal narcotics abuse in terms of : (a) legal substance associated with the rule of rehabilitation in Law Number 35 Year 2009, because drug dealers can take cover behind the status of users who are ultimately made rehabilitation; (b) the legal structure associated with the human resource capacity is not maximized; and (c) legal culture due to lack of public awareness to provide information; and (3) the efforts undertaken to overcome obstacles in eradicating narcotics abuse are : (a) improving human resources by training and structuring as well as vocational schools of narcotics, actively conduct guidance and counseling; (b) cooperate with relevant agencies, both internally and externally by performing periodic urine checks and providing information; (c) establishing information networks and information resources in the community.

Keywords : Law Enforcement, Crime, and Narcotics